



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan didalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan

yang ada. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini. Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara pada masa yang akan datang.

Penajam, 20 februari 2025

Kepala Dinas



Chairur Rozikin, S.Sos MM

NIP. 197004071992031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017, Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi yaitu Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pelaksanaan pemetaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pelaksanaan pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terpadu, Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB, Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, Pelaksanaan pelayanan KB, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL. BAGAN / DIAGRAM	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar Pembentukan Organisasi	3
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Aspek Strategis dan Permasalahan	8
F. Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023	11
G. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PE NUTUP	30
LAMPIRAN	31

Lampiran-lampiran :

A. Matrik Rencana Strategis Tahun 2024-2026

B. Rencana Akasi Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

E. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 2023

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Dasar pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.;

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

2. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017, Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pelaksanaan pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terpadu;
- h. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- j. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- k. Pelaksanaan pelayanan KB;

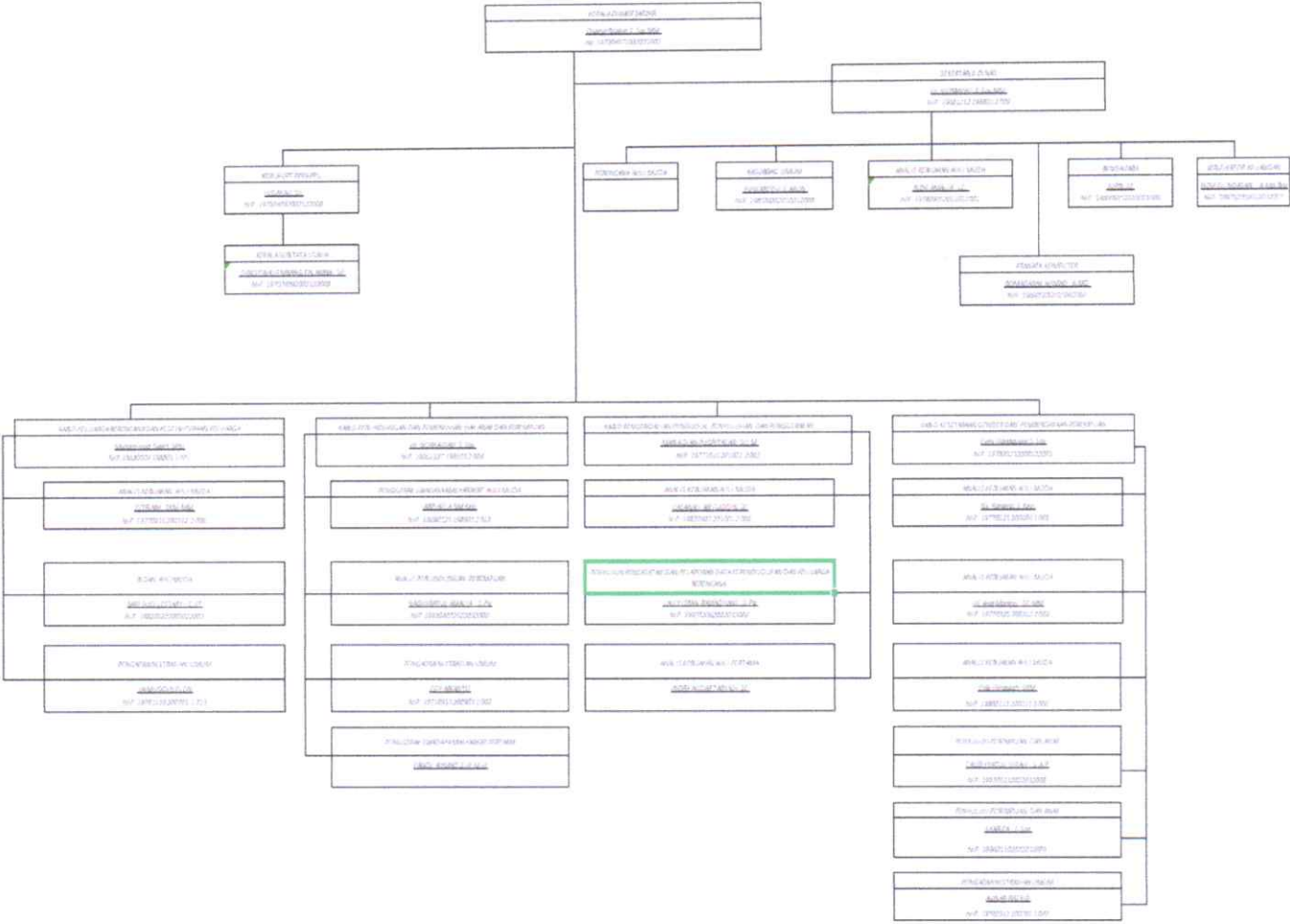
- l. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Terdiri Atas :
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - f. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran.

STRUKTUR ORGANISASI DALAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 memiliki Sumber Daya Aparatur Daerah (SDAD) sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang. Berdasarkan analisa beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah Sumber Daya Aparatur Daerah (SDAD) tersebut belum memadai untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan, juga masih belum memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikut sertakan staf pada diklat di masa yang akan datang.

Rincian Sumber Daya Aparatur Daerah (SDAD) berdasarkan pendidikan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	3	1	7	8	19
3	D3	0	3	0	0	3
4	S1	5	12	0	7	24
5	S2	1	5	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

E. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Kebijakan kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memfokuskan perhatiannya pada tahapan perubahan demografi khususnya pada upaya pengaturan kelahiran untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut maka dilakukan upaya fertilisasi yang instrumen utamanya adalah mengajak dan memotivasi masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut dalam Program Keluarga Berencana.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat menyadari walau pun jumlah penduduknya belum begitu besar, tetapi kewaspadaan terhadap efek negatif dari peledakan jumlah penduduk yang diwujudkan dalam bentuk program telah dan terus dilakukan dengan mengkampanyekan pentingnya pengendalian kelahiran (growth control) melalui pelayanan kontrasepsi sampai ke pelosok pedesaan.

Berbagai kecenderungan pembangunan terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada urusan ini di temukan Berbagai isu-isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

a. Permasalahan terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan:

- 1) Masih sedikitnya perempuan yang memiliki jabatan strategis baik swasta maupun pemerintah
- 2) Masih rendahnya jenjang pendidikan perempuan
- 3) Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
- 4) Masih rendahnya perempuan mandiri di bidang Ekonomi khususnya pada kepala keluarga perempuan (single Parent)
- 5) Masih rendahnya pelaku usaha perempuan produktif

b. Permasalahan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan

Perempuan:

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Belum optimalnya lembaga penanganan korban kekerasan pada perempuan
- 2) Tingginya kasus kekerasan pada anak dan Belum optimalnya

lembaga penanganan korban kekerasan anak

- 3) Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara Utara sebagai Kabupaten Layak Anak, belum optimalnya pelaksanaan KLA dan belum Tercapainya Kategori KLA.
- c. Permasalahan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- 1) Lemahnya Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
 - 2) Lemahnya Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 - 3) Stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi Program KKBPK di Lini Lapangan
- d. Permasalahan terkait Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
- 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga
 - 2) Belum meratanya Akses dan Kualitas Pelayanan KB untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
 - 3) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.

F. HASIL DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022 - 2023

Progres Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2022	78,11	Sangat Baik
2	2023	79,75	Sangat Baik

Tabel 2. Hasil Penilaian AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan tindak lanjutnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Tahun 2025
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	Tahun 2025
	Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, namun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang belum sepenuhnya Smart, menggunakan penyelarasan (cascading) yang telah diformalkan, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).	Tahun 2025
	Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, ini dikarenakan belum ada pemantauan dalam bentuk monitoring dan evaluasi	Tahun 2025
2	Pengukuran Kinerja	Tahun 2025
	Pengukuran kinerja telah dilakukan	Tahun 2025
	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	Tahun 2025

	berkelanjutan	
	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Tahun 2025
3	Pelaporan Kinerja	Tahun 2025
	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kinerja	Tahun 2025
	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Tahun 2025
	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Tahun 2025
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	Tahun 2025
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Tahun 2025
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	Tahun 2025
	Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	Tahun 2025

G. Sistematika Penyajian

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Aspek Strategis dan Permasalahan
- F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
- G. Sistematika Penyajian

BAB.II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB.IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2024-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 3 tahun. Rencana Strategis ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 3 (tiga) tahun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen RPD tahun 2024-2026 RPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah. Berdasarkan pemahaman dasarnya, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Transformasi Ekonomi yang berdaya saing; dan
5. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2024-2026, adalah: "TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS" Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain:

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju adalah: Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang modern adalah: Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang religius : Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar,sederajat dan seimbang dunia & akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakumdinrukum Waliyadin dan Pancasila.

Untuk mencapai Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2024-2026, maka diwujudkan dalam 11 misi, yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Maksud misi ini adalah : Peningkatan pendapatan masyarakat melalui Pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulan dana.

2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Maksud misi ini adalah : Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik Investasi Masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalmantan Timur.

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan, Maksud misi ini adalah :

A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki

pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional , nasional bahkan international.

B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah wilayah yang sulit dijangkau.

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Maksud misi ini adalah :

A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai.

B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.

5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Maksud misi ini adalah :

A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor.

B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.

6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Maksud misi ini adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman,

Maksud misi ini adalah :

A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi.

B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat.

C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.

8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan

non migas.

Maksud misi ini adalah :

A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum tergali secara optimal.

B. Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industri.

9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Maksud misi ini adalah : Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, profesional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara beragama Islam.

10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Maksud misi ini adalah : Melalui pengembangan sistem informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah

11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Maksud misi ini adalah Unsur visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana masuk dalam Misi Ke 3, 9 dan 10.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil;

2. Jangkauan kedepan, yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh organisasi;
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Upaya perwujudan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahun 2024 - 2026 yang telah diuraikan dalam Renstra (Rencana Strategis) akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
 - Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
 - Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode tahun 2024-2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada RPD, Renstra dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya Urusan pemerintahan di Dinas	Persen	100
2	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100
		Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan	Persen	100
3	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	51
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	570
		Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)	Persen	100
		Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak	Persen	100
		Meningkatnya Pemenuhan Anak	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat oleh sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang kepada pihak pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh pengguna anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk :

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta;
4. Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024, target akhir Renstra 2024 – 2026 serta target pemerintah daerah lainnya. Pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya, dapat dijelaskan perhitungannya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan di dinas	100	98	98%
2	Persentase Pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	100	100	100%
3	Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan	100	95	95%
4	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	86,9	50,02	57,56%
5	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	580	603,66	105.90%
6	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)	100	80	80%
7	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak	100	65.76	65.76%
8	Meningkatnya Pemenuhan Anak	100	80	80%

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel 3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1
Terlaksananya Urusan Pemerintahan di Dinas

Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir	Capaian s/d 2024
		Target	Realisasi	Realisasi		

				(%)	Renstra (2026)	terhadap renstra
Terlaksananya Urusan Pemerintahan di Dinas	88	100	98	98%	95	103%

Indikator Kinerja 1 :

Terlaksananya urusan Pemerintahan di Dinas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah dapat dianalisis sebagai berikut :

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 98% dengan target 100% tidak memenuhi target yang telah ditetapkan tetapi masih ada keberhasilan didalamnya dikarenakan sasaran yang telah terealisasi tidak jauh dari target yang ditetapkan
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 98% dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88% mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 98% dengan target akhir renstra tahun 2026 95% telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 98% telah memenuhi target Terlaksananya Urusan Pemerintahan yaitu 83,55.
- Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 1. Mengoptimalkan pelaksanaan budaya kerja
 2. Kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan arahan yang jelas
 3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten
 4. Birokrasi yang efisien dan transparan
 5. Kerjasama antar instansi dan lembaga

Adapun analisis efisiensi capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya urusan Pemerintahan di Dinas	98	93,14%	4,86	Efisien

--	--	--	--	--	--

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,86 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 98% hanya membutuhkan anggaran sebesar 93,14%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tabel 3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dan Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan

Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap renstra
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100	100%	95	105%
Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang		100	99	99%	100	95%

Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan						
--	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja 1 :
Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

- Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini sebesar 100% dengan target 100% telah memenuhi target yang ditetapkan.
- Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan dinas melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di dinas
- Program program yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan stunting

Tabel. Analisis Efisiensi anggaran indikator Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	100	92,68%	7.32	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,32 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya membutuhkan anggaran 92,68%

Indikator Kinerja 2 :
Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 95% dengan target 100% belum memenuhi target yang telah ditetapkan tetapi kinerja masih termasuk kategori baik.
- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 95% dengan target akhir renstra 100% belum memenuhi target akhir Renstra

Adapun analisis efisiensi capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. Analisis Efisiensi anggaran indikator Persentase pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan kegiatan diBidangPengendalia nPenduduk, Penyuluh an dan Penggerakan	99	95%	4	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99% hanya membutuhkan anggaran 95%

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

Indek Pemberdayaan Gender (IDG), Skor Kabupaten Layak Anak (KLA), Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG), Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak, dan Meningkatnya Pemenuhan Anak

Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap renstra
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indek Pemberdayaan	50,59	86,9	50,02	57,56%	-	50,02

Gender (IDG)						
Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	622	580	-	-	600	-
Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)	0	100	80	80%	-	80%
Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak	-	100	80	80%	100	80%
Meningkatnya Pemenuhan Anak	-	100	90	90%	-	90%

Indikator Kinerja 1 :

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 50,02% dengan target 86,9% belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan target yang ditetapkan sangat tinggi.
- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini tidak dapat disandingkan dengan target akhir renstra dikarenakan tidak terdapat baseline data

Tabel Analisis Efisiensi anggaran indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	50,02	99,17%	- 49.15	Tidak Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar - 49.15 dan dapat dikatakan tidak efisien karena capaian kinerja hanya sebesar 50,02% membutuhkan anggaran sebesar 99,17%

Indikator Kinerja 2 :

Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

- Untuk indikator skor kabupaten layak anak belum dapat dianalisis dikarenakan data untuk tahun 2024 belum rilis dan tidak dapat dianalisis efisiensi anggarannya

Indikator Kinerja 3 :

Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 80% dengan target 100% belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan dalam kegiatan bimtek pprg ada beberapa skpd yang tidak hadir.
- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini tidak dapat disandingkan dengan target akhir renstra dikarenakan tidak terdapat baseline data

Tabel Analisis Efisiensi anggaran indikator Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutaman gender dalam Pembangunan (PPRG)	80	99,17%	- 25.00	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar - 25.00 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 80% hanya membutuhkan anggaran 99.17%

Indikator Kinerja 4 :

Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 80% dengan target 100% belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini belum memenuhi target dengan target akhir renstra.

Tabel Analisis Efisiensi anggaran indikator Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	80	77,98%	2,02	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,02 dan dapat dikatakan efisien karena capaian kinerja sebesar 80% membutuhkan anggaran sebesar 77,98%

**Indikator Kinerja 5 :
Meningkatnya Pemenuhan Anak**

- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 90% dengan target 100% belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini tidak dapat disandingkan dengan target akhir renstra dikarenakan tidak terdapat baseline data.

Tabel Analisis Efisiensi anggaran indikator Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	90	90.43%	0,43	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,43 dan dapat dikatakan efisien karena capaian kinerja sebesar 90% membutuhkan anggaran sebesar 90,43%

B. Realisasi Anggaran

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	% Realisasi
1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.991.782.340	7.334.451.342	91.77
2	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	958.379.272	940.213.967	98.10
3	program perlindungan perempuan	629.286.197	542.905.668	86.27
4	program peningkatan kualitas keluarga	28.157.715	27.712.775	98.42
5	program pengelolaan sistem data gender dan anak	66.127.729	58.041.200	87.77
6	program pemenuhan hak anak (pha)	305.755.537	276.509.393	90.43
7	program perlindungan khusus anak	442.990.403	293.259.655	66.20
8	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.982.084.657	2.891.468.960	96.96
9	program pengendalian penduduk	389.973.855	349.578.120	89.64
10	program pembinaan keluarga berencana (kb)	1.713.684.447	1.585.009.373	92.49
11	program pemberdayaan Dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.176.590.429	1.149.786.947	97.72

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2024 prestasi atau penghargaan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya sebagai berikut :

1. Juara 3 Lomba Inovasi Daerah kategori initial innovation tingkat OPD
2. Juara 2 kategori lomba SSK Paripurna Tingkat Provinsi
3. Juara 2 kategori lomba Pengelolaan manajemen dashat Tingkat Provinsi
4. Juara 2 kategori lomba yel-yel SKPD Tingkat Provinsi
5. Juara 3 dan Harapan 1 kategori lomba Menu Kreasi Sehat Dashat Tingkat Provinsi
6. Juara 1 Kategori Lomba RDK PARIPURNA Tingkat Kabupaten

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP dalam SAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategik, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stake Holder sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. LKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 dengan kesesuaian dokumen RKT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara 2024, serta Perjanjian Kinerja 2024. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri atas 3 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap- tiap indikator

kinerja pada LKjIP 2024 dikategorikan sudah berhasil karena nilai capaiannya sesuai target.

B. Langkah Perbaikan

Dimasa Mendatang dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah Bagian terpenting dalam proses penyusunan Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang tepat untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja oleh karena nya sumber daya manusia didorong untuk lebih mengefektifitaskan kegiatan yang dilakukan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan kinerja sasaran strategis pada satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam, 20 februari 2025

Kepala Dinas

Chairur Rozikin, S.Sos MM

NIP. 197004071992031005

Lampiran 1 :

RENCANA AKSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun : 2024

RENCANA AKSI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Target				PENANGGUNG JAWAB	
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubbag Umum	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kasubbag Umum	

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	Kasubbag Umum	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	Kasubbag Umum	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	Kasubbag Umum	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Kasubbag Umum	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Kasubbag Umum	
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8%	PROGRAM PENGARU SUTAMAA N GENDER DAN PEMBERD AYAAN PEREMPU AN	Pelembagaa n Pengarusuta maan Gender (PUG) padaLembag a Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota	Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPUG KewenanganKabupate n/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	Persenta se Partisipas i Perempu	15%			Advokasi Kebijakan danPendampinganPen ingkatan PartisipasiPerempuan dan Politik,Hukum,	9 Organisasi	9 Organisasi	9 Organisasi	8 Organisasi	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		

an di Lembaga Pemerintah dan Swasata				Sosial dan Ekonomi						
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	7 organisasi	6 organisasi	6 organisasi	6 organisasi	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Presentase Ketersediaan Data Gender	45%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	

Meningkatnya pelayanan puspora	250 Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	8 Orang	8 Orang	Kepala UPTD	

					Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	3 Orang	5 Orang	5 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
		Capaian Penilaian Kabupaten Layak Anak	580 point	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	11 Organisasi	11 Organisasi	11 Organisasi	12 Organisasi	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	

Kewenangan Kabupaten/K ota	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	14 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	

						Kabupaten/Kota						
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2 Orang	2 Orang	4 Orang	2 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	4 Orang	2 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	0 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	

					Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	12 Orang	12 Orang	14 Orang	12 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
						Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	2 Orang	4 Orang	2 Orang	2 Orang	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kasubbag Umum	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Kasubbag Umum	

4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan Meningkatkan Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	33 Kampung	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Rumah Data	2 Rumah Data	2 Rumah Data	2 Rumah Data	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	

						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
		Tersedian ya Fasilitas Pembina an di Kampung KB	2 Rumah Data	PROGRAM PEMBINA AN KELUARG A BERENCA NA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	-	-	-	-	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
		Meningka tnya akseptor MKJP (Metode Kontrase psi Jangka Panjang) Menurun nya angka putus pakai (DO)	28.55%			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-	-	-	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
			17.58%			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	-	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
		Meningka tnya CPR (Contrase ption	80.25%			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan	

		Prevalence Rate)			dan Elektronik serta Media Luar Ruang						Penggerakan	
		Menurunnya angka Unmet Need Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangga Kencana	17.58%	70%		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	13 Organisasi	13 Organisasi	13 Organisasi	15 Organisasi		Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
		Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	2.09%		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	-	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
						Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	2 Organisasi	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	
						Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	

	Berencana (PKB/PLKB)						
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	182 Orang	182 Orang	182 Orang	183 Orang	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarak	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	

					atan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	9 Kampung	9 Kampung	9 Kampung	9 Kampung	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4 Kelompok UPPKA	PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8 Keluarga	8 Keluarga	8 Keluarga	8 Keluarga	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

		Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapat kan Fasilitas Pembina an 1000 HPK	5168 Keluarga		Pengadaan SaranaKelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberd ayaan Dalam Rangka Penuruna n Stunting	2 Kampu ng		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkono miKeluarga/UPPKS)	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

					PELAKSANA AN DAN PENINGKAT AN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYAR AKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATE RI/KOTA DALAM PEMBANGU NAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHT ERAAN KELUARGA	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairur Rozikin, S.Sos MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Muhammad Zainal Arifin S.Hut., M.si

Jabatan : Pj.Bupati Penajam Paser Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya d sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Penajam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut., M.Si

Pihak Pertama

Kepala Dinas P3AP2KB

CHAIRUR ROZIKIN, S.SOS.MM
NIP : 197004071992031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya Urusan pemerintahan di Dinas	Persen	100
		Penilaian Mandiri SPIP	Level	3
		Nilai SAKIP	Nilai	78
		Nilai IKM	Nilai	82,50
2	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Program KKBPK	Persen	100
3	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	51
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	590
		Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan (PPRG)	Persen	100
		Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak	Persen	100
		Meningkatnya Pemenuhan Anak	Persen	100

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 9.151.730.237
2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp. 1.225.244.629
3	Program perlindungan perempuan	Rp. 742.418.292
4	Program peningkatan kualitas keluarga	Rp. 8.398.488
5	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Rp. 18.599.000
6	Program pemenuhan hak anak (pha)	Rp. 71.520.328
7	Program perlindungan khusus anak	Rp. 560.113.848
8	Program pengendalian penduduk	Rp. 185.387.582
9	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Rp. 1.549.084.736
10	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Rp. 1.540.472.083
TOTAL		Rp. 15.052.969.223

Penajam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj.Bupati Penajam Paser Utara

Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas P3AP2KB

Chairur Rozikin, S.Sos.MM
NIP : 197004071992031005

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Dr. Muhammad Zainal, M.si	PJ.BUPATI	
2.	Drs. H. Tohar MM	SEKDA	
3.	Nicko Herlambang, ST, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Aparatur	
4.	Chairur Rozikin, S.Sos MM	Kepala DP3AP2KB	

Lampiran 2 :

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten : Penajam Paser Utara
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	101.568	0	0.00
	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih	7	5	71.42
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.15	1.5	76.66
	Total Fertility Rate (TFR)	2.09	-	-
	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	80.25	70.02	
	Tingkat putus pakai (DO)	17.58	-	0.00
	Unmeed Need	17.58	9.8	
	Akseptor MKJP	24.5	25	102.04
	ASFR (Age Speciefic Fertility Rate)	23	23	100.00
	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	100	100	100.00
	Jumlah Poktan	0	0	0
	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	81.2	81.2	100
	Peningkatan IPG	90.46	0	0.00
	Peningkatan IDG	79.7	0	0.00
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager,profesional,administrasi,te khnisi	12	40	333.33
	Penerapan Anggaran Responnsif Gender pada OPD	100	100	100.00
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih	8	4	50
	Jumlah keluarga rentan yang tertangani	7	11	157.14
	Jumlah kasus korban terhadap anak yang tertangani sesuai dengan standart	27	39	140.74
	Terwujudnya KLA	580	-	-
	Jumlah kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	12	14	116.66

Lampiran 3 :

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisisensi
1	2	3	4			
1	Meningkatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya urusan pemerintahan di Dinas	100%	98%	93.14%	4.86
2	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase Pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	100%	100%	92.68%	7.32
		Persentase pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan pergerakan	100%	95%	95%	4
3	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	51%	50.02	99.17%	- 49.15
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	570 Poin	-	90.43%	-
		Meningkatnya Implementasi	100 persen	80	99.17%	- 25.00

	kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)				
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	100 persen	65.76	77.98%	2.02
	Meningkatnya pemenuhan anak	100 persen	80	90.43%	0.43